

Media Online	Rakyat Sulsel
Tanggal	Senin, 24 Maret 2025
Wilayah	Kota Makassar



Dilarang Pakai Randis-Terima Parsel



MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran Idulfitri 2025 atau untuk penggunaan pribadi. Para pejabat juga diminta tidak menerima parsel atau bingkisan dalam bentuk apapun. Pejabat yang menguasai kendaraan dinas diinstruksikan untuk menggunakan mobil pribadi. Pejabat Makassar bisa pakai mobil bila mendapat izin wali kota. Masyarakat diminta aktif memantau dan melapor bila ada randis yang "ikut-ikutan" mudik Lebaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk kepentingan pribadi selama libur Lebaran. Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan aturan ini berlaku bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel. "Gubernur sudah menandatangani surat edaran yang mengatur penggunaan kendaraan dinas selama dan setelah Lebaran, termasuk saat cuti bersama dan libur nasional," ujar Jufri, akhir pekan lalu.

Kendaraan dinas, lanjut Jufri, hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan. Pejabat yang hendak mudik diimbau untuk menggunakan kendaraan pribadi. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi pelaksanaan aturan ini. "Ciri-ciri kendaraan dinas itu berplat merah," kata dia.

Selain larangan penggunaan kendaraan dinas, pejabat Pemprov Sulsel juga dilarang menerima hampers Lebaran. Jufri mengungkapkan edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi sudah diterima dan akan diterapkan secara ketat.

"Pejabat tidak boleh menerima hampers dalam bentuk apa pun, kecuali makanan dari keluarga terdekat, karena itu bagian dari tradisi," katanya. Jika ada pemberian hampers dari pihak lain, pejabat diwajibkan menyerahkannya ke lembaga sosial seperti panti asuhan atau panti jompo.

Pemprov Sulsel juga akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN mulai 24 hingga 27 Maret 2025. Adapun libur nasional Lebaran ditetapkan pada 31 Maret hingga 1 April 2025, diikuti cuti bersama pada 2-4 April. Akhir pekan pada 5-6 April menambah rangkaian libur, yang berlanjut dengan cuti bersama pada 7 April. Aktivitas pemerintahan akan kembali normal pada Selasa, 8 April 2025.

Adapun, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkot Makassar untuk keperluan mudik lebaran. Dia menyebut penggunaan randis tanpa izin untuk pulang kampung rawan menimbulkan masalah.

"Nanti saya bikin larangan dipakai randis untuk pulang kampung. Ada namanya kepercayaan yang harus kita bangun. Kalau hal itu saja kita tidak tawadhu, di dalam pekerjaan apalagi," kata Munafri, kemarin.

Meski demikian, Munafri tetap memberi ruang bagi pegawai yang ingin menggunakan randis. Asalkan, lanjut dia, pegawai terlebih dahulu meminta izin secara resmi. Dia mencontohkan, penggunaan randis bisa dipertimbangkan jika pegawai tersebut memiliki keperluan mendesak dan tidak memiliki kendaraan pribadi. "Kalau datang minta izin, misalnya bilang, 'Pak, saya

ada orang tua, saya tidak punya mobil, bisa saya pakai?’ Apa susahnya datang minta izin?’ imbuh Munafri. Munafri menekankan risiko penggunaan randis tanpa izin. Ia menyinggung potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa berujung pada persoalan hukum hingga pencemaran nama baik instansi.

“Bayangkan kalau terjadi apa-apa di jalan. Bayangkan kalau ganti plat, kita tidak tahu, terjadi laka lantas, terus akhirnya terbongkar juga, kan tidak bagus,” ujar dia. “Datanglah minta izin baik-baik. Tapi jangan lagi, umpamanya, sudah dikasih izin, lalu minta uang bensin dari kantor,” lanjut Munafri. Maka dari itu, Munafri memastikan akan ada pengawasan ketat dalam penggunaan randis jelang musim mudik. Dia mengatakan pencegahan jauh lebih baik ketimbang menyelesaikan masalah setelah kejadian. “Saya selalu berusaha untuk mencegah. Kalau sudah kejadian, ribet,” tutur dia. Munafri mengingatkan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Munafri mengatakan, ketidakpatuhan terhadap aturan kecil berpotensi berpengaruh pada hal yang lebih besar di pekerjaan.

“Hal kecil yang kau tidak ikuti, berdampak pada pekerjaan. Bagaimana kalau datang yang lebih besar? Pasti terpengaruh. Makanya saya bilang, tolong jaga baik-baik. Ini persoalan kedisiplinan saja,” tutur Munafri.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Supratman, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk keperluan pulang kampung saat libur Lebaran. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah tepat untuk menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas.

“Kami mendukung, supaya ini juga menjadi ajang menertibkan seluruh ASN yang memiliki kendaraan dinas,” ujar Supratman. Dia menegaskan, kebijakan ini bukan untuk membatasi mobilitas ASN, melainkan untuk memastikan bahwa randis digunakan sesuai peruntukannya. Menurut dia, ASN tetap diperbolehkan mudik, tetapi tidak dengan kendaraan dinas.

“Boleh pulang, tapi jangan dipakai randis-nya. Menarik juga kebijakan ini Pak Wali,” imbuh politikus Partai NasDem ini. Supratman menilai bahwa langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan disiplin dan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini bersifat mendadak atau tanpa dasar yang jelas. “Kami dukung kebijakan yang baik untuk mendisiplinkan ASN,” ujar dia.

Supratman menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada surat resmi yang disampaikan terkait kebijakan tersebut, namun pihaknya tetap memberikan dukungan penuh. Menurut dia, banyak ASN yang selama ini kurang disiplin dalam penggunaan kendaraan dinas, sehingga aturan ini bisa menjadi langkah awal untuk menertibkan mereka. “Karena ini ajang untuk menertibkan ASN. Banyak juga ASN yang seenaknya menggunakan randis tanpa mengikuti aturan,” tutur dia.

Supratman menegaskan bahwa dirinya secara pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Makassar sangat mendukung segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN. Dia berharap kebijakan ini dapat diikuti dengan pengawasan yang ketat agar aturan benar-benar diterapkan dan tidak hanya menjadi formalitas semata.